



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);

46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WICOWO, SH

Revisi Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2021
NOMOR 1/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
247-4/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu untuk melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun. Untuk menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 100

DAFTAR ISI

PERDA.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Hubungan Antar Dokumen	14
1. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	15
2. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.....	17
3. P- RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....	18
4. P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Daerah lain (Kabupaten Madiun)	20
I. P-RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun 2005-2025.....	21
II. P-RPJMD dengan RTRW Kota Madiun 2010-2030	22
III. P-RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	24
IV. P-RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	25
V. P-RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	27
1.4 Maksud dan Tujuan	28
1.5 Sistematika Penulisan	28
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	31
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	31
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	31
2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	31
2.1.1.2 Kondisi Topografi.....	33
2.1.1.3 Kondisi Geologi	34
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi	34
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi.....	35
2.1.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	36
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	54
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	56
2.1.3 Kawasan Rawan Bencana	59
2.1.4 Kondisi Demografi.....	61
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	67
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	67
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	67
2.2.1.2 Struktur Ekonomi.....	74
2.2.1.3 Laju Inflasi	77
2.2.1.4 PDRB per Kapita.....	79
2.2.1.5 Indeks Gini	80
2.2.1.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	81
2.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin	81
2.2.1.8 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	87
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	87
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	87
2.2.2.2 Angka Melek Huruf.....	89
2.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah	90
2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah	91
2.2.2.5 Usia Harapan Hidup	92
2.2.2.6 Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	92
2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	94
2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	96
2.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja.....	97
2.2.2.10 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas.....	98
2.2.2.11 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK.....	99
2.2.2.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan	100
2.2.2.13 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	101
2.2.2.14 Penanganan Daerah Rawan Pangan	101

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	102
2.3 Aspek Pelayanan Umum	104
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib.....	104
2.3.1.1 Pendidikan	104
2.3.1.2 Kesehatan.....	112
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	125
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	127
2.3.1.6 Sosial.....	130
2.3.1.7 Tenaga Kerja.....	133
2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135
2.3.1.9 Pangan	140
2.3.1.10 Pertanahan	141
2.3.1.11 Lingkungan Hidup	142
2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	146
2.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	149
2.3.1.14 Perhubungan	151
2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika	154
2.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	156
2.3.1.17 Penanaman Modal.....	157
2.3.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga	160
2.3.1.19 Statistik	161
2.3.1.20 Persandian.....	162
2.3.1.21 Kebudayaan.....	162
2.3.1.22 Perpustakaan.....	164
2.3.1.23 Kearsipan.....	165
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	166
2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan	166
2.3.2.2 Pariwisata.....	167
2.3.2.3 Pertanian.....	169
2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral	177
2.3.2.5 Perdagangan	178
2.3.2.6 Perindustrian.....	181
2.3.2.7 Transmigrasi.....	183
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	184
2.3.3.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	184
2.3.3.2 Fungsi Penunjang Pengawasan	187
2.3.3.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.....	187
2.3.3.4 Fungsi Penunjang Keuangan	189
2.3.3.5 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan	191
2.3.3.6 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.....	192
2.3.3.7 Fungsi Penunjang Kecamatan.....	193
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	195
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	195
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	195
2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan.....	196
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	197
2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	197
2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun.....	198
2.4.2.3 Ketaatan terhadap RTRW	199
2.4.2.4 Luas Wilayah Produktif (Ha).....	199
2.4.2.5 Luas Wilayah Industri (Ha)	200
2.4.2.6 Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	200
2.4.2.7 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	200
2.4.2.8 Perusahaan Asuransi.....	202
2.4.2.9 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel	202
2.4.2.10 Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	203
2.4.2.11 Ketersediaan Daya Listrik	204
2.4.2.12 Pelanggan Listrik	205
2.4.2.13 Kenyamanan Kota	206
2.4.2.14 Infrastruktur	206
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	207
2.4.3.1 Angka Kriminalitas Tertangani	207
2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi.....	207

2.4.3.3	Indeks Kerukunan	208
2.4.3.4	Indeks Rasa Aman	209
2.4.3.5	Lama Proses Perizinan	209
2.4.3.6	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	212
2.4.3.7	Persentase Perda yang mendukung Dunia Usaha	212
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	213
2.4.4.1	Kualitas Tenaga Kerja	213
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan	214
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....		242
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	243
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	243
3.1.1.1	Realisasi Pendapatan Daerah	244
3.1.1.2	Realisasi Belanja Daerah	253
3.1.1.3	Realisasi Pembiayaan Daerah	262
3.1.2	Neraca Daerah	265
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	275
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	278
3.2.1.1	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	278
3.2.1.2	Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	278
3.2.2	Analisis Pembiayaan	282
3.3	Kerangka Pendanaan	286
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	286
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	293
3.3.3	Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	296
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		302
4.1	Permasalahan Pembangunan	302
4.2	Isu Strategis	314
4.2.1	Identifikasi isu-isu strategis	314
4.2.2	Penetapan Isu Strategis Pembangunan Daerah	322
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....		333
5.1	Visi	333
5.2	Misi	334
5.3	Tujuan dan Sasaran	336
5.3.1	Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama	336
5.3.2	Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua	337
5.3.3	Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga	338
5.3.4	Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat	338
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		346
6.1	Strategi Pembangunan	346
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	354
6.3	Program Pembangunan Kota Madiun	367
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....		413
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		492
8.1	Indikator Kinerja Utama	492
8.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	493
BAB IX PENUTUP.....		590
9.1	Pedoman Transisi	590
9.2	Kaidah Pelaksanaan	591

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMN	16
Tabel 1.2 Keselarasan Dokumen P-RPJMD Kota Madiun dengan RTRW Provinsi Jawa Timur	18
Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Provinsi	19
Tabel 1.4 Identifikasi RPJMD Daerah Lain	20
Tabel 1.5 Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun	21
Tabel 1.6 Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan RTRW	24
Tabel 1.7 Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan KLHS P-RPJMD	25
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun	32
Tabel 2.2 Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun	32
Tabel 2.3 Kondisi Iklim di Kota Madiun Tahun 2020	35
Tabel 2.4 Perhitungan kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2020	36
Tabel 2.5 Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan Kota Madiun Tahun 2020	36
Tabel 2.6 Perhitungan Daya Dukung Pangan (Beras) Kota Madiun	38
Tabel 2.7 Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Madiun	39
Tabel 2.8 Daya Dukung Lahan Bangun (DDL) Kota Madiun Tahun 2020	40
Tabel 2.9 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha) Tahun 2020	41
Tabel 2.10 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha) Tahun 2020	42
Tabel 2.11 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha) Tahun 2020	43
Tabel 2.12 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha) Tahun 2020	44
Tabel 2.13 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha) Tahun 2020	46
Tabel 2.14 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha) Tahun 2020	47
Tabel 2.15 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha) Tahun 2020	48
Tabel 2.16 Analisis Pencemaran Air Sungai di Kota Madiun	51
Tabel 2.17 Penggunaan Lahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	54
Tabel 2.18 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2020	56
Tabel 2.19 Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota Madiun, 2020	57
Tabel 2.20 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2020	58
Tabel 2.21 Intensitas Bencana di Kota Madiun, 2016-2020	60
Tabel 2.22 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2020	62
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2020	62
Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia, 2016-2020	64
Tabel 2.25 Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Madiun (orang), 2016-2020	65
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Agama (orang), 2016-2020	65
Tabel 2.27 Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional Tahun 2016-2020	68
Tabel 2.28 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2016-2020	69
Tabel 2.29 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016 - 2020	70
Tabel 2.30 Tipologi Klasen Kota Madiun (%)	71
Tabel 2.31 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%) Tahun 2016-2020	74
Tabel 2.32 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2016-2020	77
Tabel 2.33 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2016-2020	82
Tabel 2.34 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	86
Tabel 2.35 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2016-2020	87
Tabel 2.36 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	88
Tabel 2.37 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	91

Tabel 2.38 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	91
Tabel 2.39 Usia Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2016-2020	92
Tabel 2.40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	96
Tabel 2.42 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2016-2020	96
Tabel 2.43 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	97
Tabel 2.44 Rasio Penduduk Bekerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	97
Tabel 2.45 Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	98
Tabel 2.46 Jumlah Klub Olah Raga, Sarpras, serta Peserta Olah Raga Tahun 2016-2020.....	103
Tabel 2.47 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	104
Tabel 2.48 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	105
Tabel 2.49 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	106
Tabel 2.50 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	107
Tabel 2.51 Angka Kelulusan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.52 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2020	110
Tabel 2.53 Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Madiun Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.54 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kota Madiun Tahun 2016-2020 ...	112
Tabel 2.55 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi di Kota Madiun, 2016-2020	113
Tabel 2.56 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Madiun, 2016-2020	113
Tabel 2.57 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Madiun, 2016-2020	114
Tabel 2.58 Data Stunting, 2016-2020	115
Tabel 2.59 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020	115
Tabel 2.60 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	116
Tabel 2.61 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020.....	117
Tabel 2.62 Cakupan Imunisasi di Kota Madiun, 2016-2020	118
Tabel 2.63 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD di Kota Madiun, 2020	118
Tabel 2.64 Perkembangan Panjang Jalan dalam Km Berdasarkan Kondisi di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	120
Tabel 2.65 Perkembangan Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	120
Tabel 2.66 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	121
Tabel 2.67 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Madiun, Tahun 2020.....	121
Tabel 2.68 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	121
Tabel 2.69 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020.....	122
Tabel 2.70 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	122
Tabel 2.71 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan di Kota Madiun, 2016-2020 ...	123
Tabel 2.72 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	123
Tabel 2.73 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun, Tahun 2020.....	126
Tabel 2.74 Data Kejadian Kebakaran di Kota Madiun, 2016-2020	130
Tabel 2.75 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun, Tahun 2020.....	130
Tabel 2.76 Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kota Madiun Tahun 2016-2020	131
Tabel 2.77 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	131
Tabel 2.78 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Madiun Tahun 2016-2020	132
Tabel 2.79 Data Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	132
Tabel 2.80 Capaian Kinerja Penyelesaian Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	134

Tabel 2.81 Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (kasus hubungan industrial) Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	134
Tabel 2.82 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	134
Tabel 2.83 Keselamatan dan Perlindungan Kerja di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	135
Tabel 2.84 Persentase Partisipasi Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2013-2020.....	135
Tabel 2.85 Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	136
Tabel 2.86 Data Laporan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	138
Tabel 2.87 Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.88 Persentase Luas Tanah Bersertifikat Aset Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.89 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	142
Tabel 2.90 Indeks Kualitas Air Kota Madiun tahun 2016-2020.....	144
Tabel 2.91 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun tahun 2016-2020.....	144
Tabel 2.92 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun tahun 2015-2020	145
Tabel 2.93 Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan Persentase Penanganan Sampah di Kota Madiun, 2016-2020.....	145
Tabel 2.94 Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Madiun, 2016-2020	146
Tabel 2.95 Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Madiun, 2016-2020	146
Tabel 2.96 Cakupan Penduduk berKTP per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2013-2020	147
Tabel 2.97 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Madiun, 2016-2020.....	147
Tabel 2.98 Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	148
Tabel 2.99 Persentase Kepemilikan NIK di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	148
Tabel 2.100 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Tahun 2016-2020.....	149
Tabel 2.101 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	149
Tabel 2.102 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	150
Tabel 2.103 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	151
Tabel 2.104 Rasio Izin Trayek di Kota Madiun, 2016-2020	152
Tabel 2.105 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Madiun, 2016-2020	152
Tabel 2.106 Jumlah Angkutan Darat di Kota Madiun, 2016-2020	153
Tabel 2.107 Daya Tampung Sub Terminal, 2019-2020	153
Tabel 2.108 Persentase Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas, 2016-2020	153
Tabel 2.109 Korban Kecelakaan dan Kerugian, 2016-2020.....	153
Tabel 2.110 Jumlah Surat Kabar di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	155
Tabel 2.111 Persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2016-2020.....	156
Tabel 2.112 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	159
Tabel 2.113 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	160
Tabel 2.114 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020	161
Tabel 2.115 Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda Situs, Kawasan Cagar Budaya di Kota Madiun, 2016-2020.....	163
Tabel 2.116 Daftar Kebudayaan di Kota Madiun, 2020.....	164
Tabel 2.117 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	164
Tabel 2.118 Data Urusan Kearsipan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	165
Tabel 2.119 Data Perkembangan Perikanan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	166
Tabel 2.120 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kota Madiun Tahun 2016-2020	167
Tabel 2.121 Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	168
Tabel 2.122 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), 2020.....	170
Tabel 2.123 Luas Lahan Tegal/Kebun dan Pemanfaatan Lahannya di Kota Madiun (Ha), 2020.....	170
Tabel 2.124 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kedelai, Tahun 2016-2020	172
Tabel 2.125 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kacang Hijau, 2016-2020	173
Tabel 2.126 Perkembangan Produksi Buah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	173
Tabel 2.127 Perkembangan Produksi Tebu di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	174
Tabel 2.128 Perkembangan Populasi Ternak di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	174

Tabel 2.129	Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	175
Tabel 2.130	Perkembangan Jumlah Hewan Ternak Dipotong di Kota Madiun, 2016-2020	176
Tabel 2.131	Data Kelompok Tani di Kota Madiun Tahun 2020	176
Tabel 2.132	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	177
Tabel 2.133	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	178
Tabel 2.134	Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2016-2020.....	179
Tabel 2.135	Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	180
Tabel 2.136	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	180
Tabel 2.137	Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018 – 2020.....	182
Tabel 2.138	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	12
Tabel 2.139	Data Perkembangan Fasilitasi Ketransmigrasian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	183
Tabel 2.140	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	185
Tabel 2.141	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kota Madiun Tahun 2020	187
Tabel 2.142	Jumlah Pelanggaran Pegawai dan Hukuman yang Dikenakan, Tahun 2016-2020	188
Tabel 2.143	Jumlah Pejabat Eselon IV, III, dan II yang Sudah dan Belum Mengikuti Diklatpim, Tahun 2016-2020	188
Tabel 2.144	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	189
Tabel 2.145	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	190
Tabel 2.146	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	191
Tabel 2.147	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun Tahun 2020	192
Tabel 2.148	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2015-2020	193
Tabel 2.149	Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	195
Tabel 2.150	Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	196
Tabel 2.151	Jumlah Kendaraan Menurut Jenis dan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Madiun Tahun 2020	198
Tabel 2.152	Jumlah Orang/Barang melalui Terminal di Kota Madiun Tahun 2016-2020	199
Tabel 2.153	Ketaatan Terhadap RTRW, 2016-2020	199
Tabel 2.154	Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kota Madiun, 2016-2020	200
Tabel 2.155	Luas Wilayah Industri (Ha) di Kota Madiun Tahun 2016-2020	200
Tabel 2.156	Luas Wilayah Perkotaan (Ha) di Kota Madiun Tahun 2016-2020	200
Tabel 2.157	Jumlah Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun Tahun 2016-2020	201
Tabel 2.158	Jenis Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun	201
Tabel 2.159	Jumlah Perusahaan Asuransi Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	202
Tabel 2.160	Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Madiun, 2016-2020.....	203
Tabel 2.161	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	204
Tabel 2.162	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	204
Tabel 2.163	Ketersediaan Daya Listrik di Kota Madiun, 2016-2020	205
Tabel 2.164	Pertumbuhan Kapasitas Daya Listrik dan Pertumbuhan Listrik Terjual di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	205

Tabel 2.165 Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan Listrik Terjual di Kota Madiun Tahun 2016-2020	206
Tabel 2.166 Angka Kriminalitas di Kota Madiun Tahun 2016-2020	207
Tabel 2.167 Jumlah Demonstrasi di Kota Madiun, 2016-2020	208
Tabel 2.168 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2020	210
Tabel 2.169 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	212
Tabel 2.170 Persentase Perda yang Mendukung Dunia Usaha di Kota Madiun, 2016-2020	213
Tabel 2.171 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Madiun, 2020	213
Tabel 2.172 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Madiun, 2016-2020	214
Tabel 2.173 Usia Produktif, Usia Tidak Produktif di Kota Madiun, 2016-2020	215
Tabel 2.174 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2020 pada aspek capaian indikator tujuan dan sasaran	217
Tabel 2.175 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2020 pada Tiga Aspek Pembangunan Daerah	222
Tabel 2.176 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun	240
Tabel 3.1 Capaian Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Target RPJMD Pada Tahun 2019 dan 2020	245
Tabel 3.2 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Madiun 2016 – 2020	251
Tabel 3.3 Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Target RPJMD pada Tahun 2019 dan 2020	255
Tabel 3.4 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016-2020	261
Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016–2020	264
Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun Tahun 2016-2020	267
Tabel 3.7 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (Rp juta)	272
Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun, 2016-2020	278
Tabel 3.9 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)	279
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)	280
Tabel 3.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun, Tahun 2016-2020 (Rp juta)	282
Tabel 3.12 Realisasi Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2016-2020	283
Tabel 3.13 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Madiun Tahun 2016-2020	284
Tabel 3.14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Madiun Tahun 2018-2020	285
Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Madiun Tahun 2018-2020 (Rp juta)	285
Tabel 3.16 Kerangka Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024	286
Tabel 3.17 Kerangka Makro Kota Madiun 2020-2024	287
Tabel 3.18 Proyeksi Balanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Madiun Tahun 2019-2024	288
Tabel 3.19 Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024	289
Tabel 3.20 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Madiun Tahun 2019-2024	294
Tabel 3.21 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024	295
Tabel 3.22 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024	295
Tabel 3.23 Perbandingan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	296
Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Madiun	303
Tabel 4.2 Hasil Pemetaan Masalah Pokok berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan	313
Tabel 4.3 Identifikasi Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun	316
Tabel 4.4 Kriteria Pembobotan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun	322

Tabel 4.5 Hasil Perankingan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun	322
Tabel 4.6 Perbandingan Isu Strategis RPJMD 2019-2024 dengan Ranwal RPJMD Perubahan 2019-2024	331
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi	334
Tabel 5.2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Panca Karya, dan Rumusan Misi	334
Tabel 5.3 Perumusan dan Penjelasan Misi	335
Tabel 5.4 Tujuan Sasaran Sebelum dan Sesudah	340
Tabel 5.5 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024	342
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024	346
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun	355
Tabel 6.3 Penjelasan Operasional Arah kebijakan Pembangunan Kota Madiun	355
Tabel 6.4 Persandingan Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan Antara RPJMD 2019-2024 Dengan Perubahan RPJMD 2019-2024	360
Tabel 6.5 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan serta program prioritas/aksi (janji politis)	368
Tabel 6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif	381
Tabel 7.1 Prioritas Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2019-2024	415
Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun 2019 -2024	417
Tabel 7.3 Rincian Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2020-2024	418
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Madiun	493
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Madiun Tahun 2019-2024	495

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prinsip, Pendekatan dan Landasan Perumusan P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024	2
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024	4
Gambar 1.3 Dasar Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024	6
Gambar 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	15
Gambar 1.5 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030	23
Gambar 1.6 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024	26
Gambar 1.7 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	27
Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kota Madiun	31
Gambar 2.2 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan di Kota Madiun	41
Gambar 2.3 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih di Kota Madiun	42
Gambar 2.4 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Madiun	44
Gambar 2.5 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Madiun.....	45
Gambar 2.6 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Madiun.....	46
Gambar 2.7 Peta Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Madiun.....	47
Gambar 2.8 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Madiun	48
Gambar 2.9 pH rata-rata Air Sungai di Kota Madiun	49
Gambar 2.10 Kandungan Oksigen Terlarut Air Sungai di Kota Madiun	50
Gambar 2.11 Total Dissolved Solid (TDS) Air Sungai di Kota Madiun.....	50
Gambar 2.12 Total Coliform Air Sungai di Kota Madiun	51
Gambar 2.13 Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Madiun Tahun 2018-2019	52
Gambar 2.14 Kapasitas Tampung Sampah di Kota Madiun	53
Gambar 2.15 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun, 2016-2020.....	61
Gambar 2.16 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun,2016-2020	67
Gambar 2.17 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	69
Gambar 2.18 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2016-2020	72
Gambar 2.19 Laju Inflasi Kota Madiun Tahun 2016-2020	78
Gambar 2.20 PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2016-2020	79
Gambar 2.21 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	80
Gambar 2.22 Perbandingan Indeks Gini Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	81
Gambar 2.23 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	86
Gambar 2.24 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	88
Gambar 2.25 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	89
Gambar 2.26 Angka Melek Huruf Kota Madiun Tahun 2016-2020	90
Gambar 2.27 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Madiun Tahun 2016-2020	93
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2016-2020.....	97
Gambar 2.29 Rasio Kesempatan Kerja Kota Madiun Tahun 2016-2020	99
Gambar 2.30 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	99
Gambar 2.31 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Madiun Tahun 2016-2020	100
Gambar 2.32 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2016-2020	101
Gambar 2.33 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	102
Gambar 2.34 Angka Melanjutkan Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	109
Gambar 2.35 Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Madiun Tahun 2015-2020	111
Gambar 2.36 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun, 2016-2020	124
Gambar 2.37 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Madiun, 2016-2020	124
Gambar 2.38 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Madiun, 2016-2020	126

Gambar 2.39 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020	127
Gambar 2.40 Rasio Petugas Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020.....	128
Gambar 2.41 Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan di Kota Madiun, 2016-2020	128
Gambar 2.42 Persentase Penegakan Perda di Kota Madiun, 2016-2020.....	129
Gambar 2.43 Penyelesaian Pelanggaran K-3 di Kota Madiun, 2016-2020	129
Gambar 2.44 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	136
Gambar 2.45 Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	138
Gambar 2.46 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun, 2016-2019	139
Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun, 2016-2020.....	140
Gambar 2.48 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	143
Gambar 2.49 Perbandingan IKLH Nasional, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2017-2019 ..	143
Gambar 2.50 Rasio Akseptor KB di Kota Madiun, 2013-2020	150
Gambar 2.51 Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Madiun, 2016-2020.....	154
Gambar 2.52 Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal di Kota Madiun, 2014-2020	155
Gambar 2.53 Jumlah UMKM Non BPR/LKM dan Usaha Kecil Mikro di Kota Madiun, 2016-2020	157
Gambar 2.54 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kota Madiun, 2016-2020	158
Gambar 2.55 Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kota Madiun, 2016-2020.....	158
Gambar 2.56 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN/PMA di Kota Madiun, 2015-2019	159
Gambar 2.57 Perkembangan Luas Panen Padi Sawah di Kota Madiun (ha), 2016-2020	170
Gambar 2.58 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Madiun, 2016-2020	171
Gambar 2.59 Perkembangan Luas Panen Kedelai (Ha) di Kota Madiun, 2016-2020	172
Gambar 2.60 Perkembangan Luas Panen Kacang Hijau di Kota Madiun (ha), 2016-2020.....	172
Gambar 2.61 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Madiun, 2016-2020	178
Gambar 2.62 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Madiun, 2016-2020	179
Gambar 2.63 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Kota Madiun, 2016-2020	181
Gambar 3.1 Struktur APBD	244
Gambar 3.2 Capaian Realisasi Terhadap Target APBD Kota Madiun Tahun 2016-2020	245
Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Kota Madiun Tahun 2016-2020	246
Gambar 3.4 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2016-2020	247
Gambar 3.5 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2016-2020	248
Gambar 3.6 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2016-2020	248
Gambar 3.7 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2016-2020	249
Gambar 3.8 Capaian Realisasi Belanja Daerah Terhadap Target APBD Kota Madiun tahun 2016-2020	254
Gambar 3.9 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	256
Gambar 3.10 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	256
Gambar 3.11 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	257
Gambar 3.12 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2016-2020	258
Gambar 3.13 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	258
Gambar 3.14 Perkembangan Pertumbuhan Belanja tak Terduga Kota Madiun Tahun 2016-2020	259
Gambar 3.15 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2016-2020	260
Gambar 3.16 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	262
Gambar 3.17 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)	292
Gambar 3.18 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)	292

Gambar 3.19 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)	393
Gambar 4.1 Lima Masalah Pckok Pembangunan Kota Madiun	312
Gambar 4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun	325
Gambar 5.1 Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024	333
Gambar 5.2 Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024	335
Gambar 5.3 Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 Tujuan 1	337
Gambar 5.4 Kerangka Logis Pencapaian Misi-2 Tujuan 2	337
Gambar 5.5 Kerangka Logis Pencapaian Misi-3 Tujuan 3	338
Gambar 5.6 Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 4	339
Gambar 5.7 Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 5	339
Gambar 6.1 Agenda/Tema RPJMD Kota Madiun 2019-2024	354

DAFTAR SINGKATAN

AMH	: Angka Melek Huruf
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
CFD	: Case Fatality Rate
CSR	: Corporate Social Responsibility
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBH-PAJAK	: Dana Bagi Hasil Pajak
DDL	: Daya Dukung Fungsi Lindung
DDLB	: Daya Dukung Lahan Bangun
DO	: Dissolved Oxygen (Kandungan Oksigen Terlarut)
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EPPD	: Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
HA	: Hektar
HLS	: Harapan Lama Sekolah
ICOR	: Incremental Capital Output Rasio
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IKA	: Indeks Kualitas Air
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	: Industri Kecil Menengah
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JKI	: Jaminan Keamanan Informasi
KB	: Keluarga Berencana
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPS	: Keluarga Pra Sejahtera
KS I	: Keluarga Sejahtera 1
K-3	: Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PD	: Pemerintah Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRB ADHB	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB ADHK	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
PKW	: Pendidikan Kecakapan Wirausaha
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMBA	: Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPH	: Pola Pangan Harapan
P-RPJMD	: Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RANPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RB	: Revormasi Birokrasi
RENJA PD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENSTRA-PD	: Rencana Strategis Pemerintah Daerah
RKA-PD	: Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja
TDG	: Tanda Daftar Gudang
TDS	: Total Dissolved Solid (Jumlah Padatan Terlarut)
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TDUP	: Tanda Daftar Usaha Pariwisata
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TSS	: Total Suspended Solid
UHH	: Usia Harapan Hidup
WS	: Wilayah Sungai
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian